

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),
 url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----
 Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

PENGURANGAN PAJAK DAN SOSIALISASI PENDAPATAN PAJAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh:

Pandapotan Ritonga¹, Dian Yustriawan² Tuti Anggreani³, Yunita Aryanti⁴

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : pandapotanritonga@umsu.ac.id

ABSTRACT

Objective - This study aims to investigate and assess the impact of the Tax Amnesty Program and Tax Socialization on Motor Vehicle Tax Revenue and taxpayer compliance as a mediator. This quantitative study uses a questionnaire to collect information from 100 taxpayers. The data were analyzed using the SmartPLS 4.0 Structural Equation Model. Findings - This study concludes that the tax amnesty program is significantly influenced by revenue. Motor vehicle tax, tax socialization has a significant effect on motor vehicle tax revenue, the tax amnesty program does not have a significant effect on taxpayer compliance, tax socialization has a significant effect on taxpayer compliance, taxpayer compliance does not have a significant impact on motor vehicle tax revenue, tax amnesty program, and tax socialization do not have a significant impact on motor vehicle tax revenue through taxpayer compliance. Originality - This study investigates taxpayer issues that significantly and broadly affect motor vehicle tax revenue. This study also offers a deeper understanding of the relationship between the tax amnesty program, tax socialization, taxpayer compliance, and tax revenue..

Keyword : *Tax Amnesty Program, Tax Socialization, Motor Vehicle Tax Revenue and Taxpayer Compliance*

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam konteks pengorganisasian pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya (Ilhamsyah dkk., 2016). Salah satu sumber pendapatan pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Di antara banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang memiliki sumber pendapatan yang cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari banyaknya orang yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka, tidak hanya itu, banyak orang memiliki lebih dari satu kendaraan sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan oleh kemudahan masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang diinginkan karena sistem kredit yang disediakan oleh dealer kepada masyarakat (Rialdy, 2022). Pendapatan pajak merupakan salah satu jenis pendapatan pajak yang berperan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi pendapatan PKB melalui berbagai upaya yang dapat meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya dengan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani & Asis, 2017) . Untuk memaksimalkan pendapatan pajak daerah melalui pajak kendaraan bermotor ini, diperlukan kepatuhan yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga pendapatan yang diterima dapat dimaksimalkan dan pembangunan dapat terwujud secara optimal (Melati dkk., 2021) . Jika kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya tinggi, maka akan berdampak pada tingginya pendapatan pajak, dan jika

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi),
 url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

masyarakat tidak patuh, maka akan berdampak pada penurunan pendapatan pajak (Lestari dkk., 2018) .

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dan menggunakan hak pajaknya dengan benar dan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku (Ilhamsyah dkk., 2016) . Kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan penerimaan pajak karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat, penerimaan pajak akan otomatis meningkat (Amri & Syahfitri, 2020) . Hal ini didukung oleh hasil penelitian Samsudin (2020) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor adalah dengan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administratif atau penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 45 Tahun 2020. Kebijakan ini sering disebut sebagai Program Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor. Program Amnesti Pajak Kendaraan Bermotor adalah penghapusan atau pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Dzulfitriah & Saepuloh, 2021) . Program ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak untuk bersedia membayar pajaknya guna meningkatkan penerimaan pajak karena denda telah dihapuskan sehingga tidak terlalu memberatkan wajib pajak yang memiliki tunggakan. Program amnesti ini dilaksanakan dengan tujuan meringankan dan meningkatkan kesadaran sehingga timbul rasa patuh dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Saputra dkk., 2022) . Hasil penelitian oleh Rahayu & Amriah (2018) menyatakan bahwa amnesti pajak kendaraan bermotor memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program amnesti pajak mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor

Program amnesti pajak dianggap sangat efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Program amnesti pajak yang dibuat oleh pemerintah akan meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak hanya membayar pokok pajak, bukan denda, sehingga akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor mereka sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor (Budiarti & Fadhilah, 2022) Penerimaan pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan negara dari sektor pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan atau diperoleh dari masyarakat sebagai pemilik kendaraan bermotor (Sugianto (2007:36) dalam Hamzah, 2018). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Budiarti & Fadhilah (2022) dan Awalina & Puspitasari (2021) , yang menyatakan bahwa program amnesti pajak berdampak pada penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Sosialisasi pajak mempengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor .

Sosialisasi pajak digunakan oleh otoritas pajak sebagai media informasi untuk menjelaskan peraturan dan kebijakan pajak terbaru. Oleh karena itu, sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak akan memengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakat mengetahui dan memahami kebijakan terkait. (Wahyudi & Arditio, 2018) . Kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan untuk memperluas potensi wajib pajak baru tentu dapat diandalkan karena semakin banyak penduduk, semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak yang diberikan otoritas pajak kepada masyarakat, semakin besar pula penerimaan pajak (Sari dkk., 2020) . Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak sejalan dengan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

penelitian Paparang dkk., (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor .

Program amnesti pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak .

Program amnesti pajak memudahkan pemenuhan kewajiban sehingga program amnesti pajak dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor (Melati dkk., 2021) . Amnesti pajak kendaraan bermotor adalah tindakan yang diambil oleh negara untuk mendorong wajib pajak yang sudah lama tidak membayar kewajiban pajak kendaraannya dengan tidak/menghilangkan beban denda keterlambatan pembayaran untuk jangka waktu tertentu . Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dzulfitriah & Saepuloh (2021) , (Melati dkk., 2021) dan (Sasana dkk., 2021) yang menyatakan bahwa program amnesti pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak .

Sosialisasi pajak adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang perpajakan yang ditujukan agar individu atau kelompok dapat memahami perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015) . Penyediaan sosialisasi oleh pemerintah membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan pemahaman tentang perpajakan, yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar untuk bertindak dan mengambil keputusan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020) . Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Saputra dkk., (2022) , Rahayu & Amirah (2018) dan Ardiyanti & Supadmi (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak memengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor .

Pandapotan (2012) Kepatuhan pajak adalah sikap ketaatan wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk berkontribusi pada pembangunan saat ini yang diharapkan dapat dipenuhi secara sukarela (Saragih & S, 2017). Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci utama untuk mencapai realisasi penerimaan pajak di suatu negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bersama (Dahrani dkk., 2021). Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak karena jika kepatuhan wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak (Wardani & Rumiyatun , 2017) . Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Zhafira (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Program amnesti pajak memengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak .

Program yang dilaksanakan setiap tahun membuat wajib pajak lalai dalam membayar pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak menggunakan program amnesti sebagai alasan untuk tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi amnesti pajak yang diberikan, semakin tinggi pula kemungkinan wajib pajak melanggar peraturan pajak sehingga dapat mengurangi kepatuhan wajib pajak dan mengakibatkan tidak mampu meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor . Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Amelia, 2021) . Program amnesti pajak kendaraan bermotor diadakan untuk memberikan stimulus kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor .

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

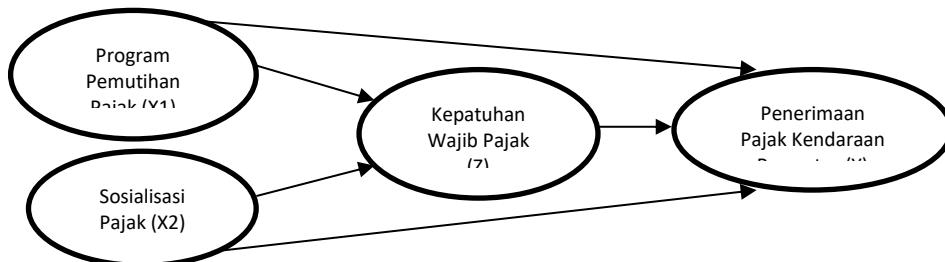
Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

Sosialisasi pajak memengaruhi pendapatan pajak kendaraan bermotor melalui kepatuhan wajib pajak .

Sosialisasi pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh petugas pajak (Samsat) untuk memberikan informasi terkait pajak kepada masyarakat, khususnya wajib pajak, agar mereka mengetahui segala hal tentang pajak berdasarkan hukum dan peraturan (Hartanti dkk., 2022). Rudianti & Endarista (2021) menyatakan bahwa kepatuhan dapat menjadi intervensi sosialisasi pajak dalam mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, dan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, semakin tinggi pula peningkatan penerimaan pajak . Sosialisasi pajak yang rendah tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak akan meningkat . Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian tersebut. Rudianti & Endarista (2021) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat memediasi hubungan antara sosialisasi pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Penulis menggunakan deskripsi kerangka konseptual untuk menunjukkan bagaimana setiap variabel independen memengaruhi variabel dependen. Kerangka konseptual tersebut digambarkan secara skematis di bawah ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE

Teknik penelitian ini dapat dilihat dari cara pembahasannya, yaitu ingin menunjukkan pengaruh antara faktor independen dan variabel dependen, sekaligus menjelaskan jenis/bentuk penelitian yang mendasari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dan kuantitatif. Partisipan dalam penelitian ini adalah Wajib pajak kendaraan bermotor dengan populasi 738.703 wajib pajak. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan rumus Slovin , yaitu sebanyak 100 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, artinya data tersebut telah dikumpulkan dan harus diproses ulang, seperti kuesioner. Pengumpulan data mengenai topik yang akan dibahas diperoleh melalui pendekatan kuesioner. Metode kuesioner adalah pendekatan yang banyak digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu dengan mendistribusikan formulir tertulis yang berisi serangkaian pertanyaan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk mendapatkan tanggapan dan informasi yang relevan . Program Amnesti Pajak menggunakan empat indikator untuk mengukur kesesuaian: kepercayaan publik, kecukupan, daya tanggap, dan akurasi, dengan tujuh pernyataan yang diadaptasi dari (Ulya et al., 2022) . Sosialisasi Pajak diukur dengan empat indikator: prosedur sosialisasi , frekuensi sosialisasi , kejelasan sosialisasi , pengetahuan pajak , dengan tujuh pernyataan yang diadaptasi dari Masita (2019) . Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor diukur dengan empat indikator yang digunakan untuk mengukur: jumlah pendapatan pajak, peningkatan jumlah wajib pajak, transparansi, kerja sama antara otoritas pajak dan wajib pajak, dengan tujuh pernyataan yang diadaptasi dari Budiarti & Fadhilah (2022) . Kepatuhan wajib pajak diukur dengan empat indikator: Ketepatan waktu , Total

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi),
 url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

pembayaran pajak , Informasi yang diberikan lengkap dan benar , Kepatuhan terhadap undang-undang pajak , dengan tujuh pernyataan yang diadaptasi dari Rahayu & Amirah (2018) . Data ini akan dievaluasi secara kuantitatif menggunakan analisis statistik, khususnya model kesetaraan struktural kuadrat terkecil parsial (PLS-SEM), yang melakukan analisis rute dengan variabel laten. Analisis ini merupakan iterasi selanjutnya dari analisis multivariat (Ghozali & Latan , 2015).

HASIL PENELITIAN

Penulis mengolah data kuesioner dalam bentuk 7 pernyataan untuk variabel-variabel tersebut. Program Amnesti Pajak , 7 pernyataan untuk variabel Sosialisasi Pajak , 7 pernyataan untuk variabel Bukti Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor , dan 7 pernyataan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak . Badan Pengelola Pajak dan Pembalasan Daerah (UPT. SAMSAT) Sumatera Utara mendistribusikan 100 kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor dan 100 kuesioner dikembalikan kepada peneliti.

Karakteristik Responden

Kuesioner dibagikan kepada 100 responden dan dikembalikan. Berdasarkan karakteristik gender, 60 responden adalah laki-laki dan 40 responden adalah perempuan, masing-masing 60 % dan 40 %. Sekitar 25 responden (25) Sebanyak 46 responden (46 %) berusia antara 18 dan 24 tahun, dan 46 responden (46 %) berusia antara 25 dan 35 tahun, serta 29 responden (29%) berusia di atas 35 tahun. Pendidikan SMA , S1 dan S2, jenis kendaraan roda 2 (68%) dan roda 4 (32%).

Evaluasi Model Pengukuran (Model Luar)

Validitas konvergen dikaitkan dengan gagasan bahwa variabel sebenarnya dari suatu konstruk harus berhubungan erat satu sama lain; validitas konvergen dievaluasi menggunakan muatan faktor dan nilai Average Variance Extracted (AVE). Tabel 1 menunjukkan hasil AVE: Tabel 1. Varian Rata-rata yang Diekstrak

Variabel	AVE	Hasil tes
Program Amnesti Pajak	0,602	Sah
Sosialisasi Pajak	0,595	Sah
Tanda Terima Pajak Kendaraan Bermotor	0,599	Sah
Kepatuhan Wajib Pajak	0,567	Sah

Tabel sebelumnya menunjukkan bahwa nilai AVE untuk setiap variabel lebih signifikan dari 0,5. Akibatnya, variabel atau konstruk yang digunakan valid. Validitas diskriminan didasarkan pada gagasan bahwa variabel dalam berbagai jenis konstruk tidak boleh terlalu mirip. Faktor Pemuatan digunakan untuk menentukan validitas diskriminan. Tabel 2 menunjukkan hasil validitas diskriminan:

Tabel 2 Faktor Pemuatan / Pemuatan Luar

Variabel	Indikator	Standar	Pemuatan Luar	Informasi
Program Amnesti Pajak (X1)	X1.1	0,70	0,851	Sah
	X1.2	0,70	0,806	Sah
	X1.3	0,70	0,757	Sah
	X1.4	0,70	0,833	Sah
	X1.5	0,70	0,714	Sah
	X1.6	0,70	0,735	Sah

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)
 url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----
 Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

	X1.7	0,70	0,722	Sah
Sosialisasi Pajak (X2)	X2.1	0,70	0,732	Sah
	X2.2	0,70	0,849	Sah
	X2.3	0,70	0,768	Sah
	X2.4	0,70	0,719	Sah
	X2.5	0,70	0,817	Sah
	X2.6	0,70	0,784	Sah
	X2.7	0,70	0,723	Sah
Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Tahun 1	0,70	0,803	Sah
	Tahun ke-2	0,70	0,788	Sah
	Tahun ke-3	0,70	0,765	Sah
	Kelas 4	0,70	0,724	Sah
	Kelas 5	0,70	0,734	Sah
	Kelas 6	0,70	0,761	Sah
	Kelas 7	0,70	0,839	Sah
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	Z.1	0,70	0,788	Sah
	Z.2	0,70	0,741	Sah
	Z.3	0,70	0,771	Sah
	Z.4	0,70	0,817	Sah
	Z.5	0,70	0,722	Sah
	Z.6	0,70	0,705	Sah
	Z.7	0,70	0,720	Sah

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap indikator variabel penelitian memiliki *nilai faktor pemuatan yang lebih tinggi pada variabel yang dibentuknya*. Studi ini menemukan bahwa indikator variabel memiliki validitas diskriminan yang kuat. Kriteria pengukuran lainnya adalah nilai Rasio Heteroit-Monotrait (HTMT). Jika nilai HTMT < 0,90, maka Konstruk tersebut memiliki validitas diskriminatif yang baik (Juliandi , 2018)

Tabel Rasio Heretrait-Monotrait

	Kepatuhan Wajib Pajak	Tanda Terima Pajak	Program Amnesti Pajak	Sosialisasi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak				
Tanda Terima Pajak		0,266		
Program Amnesti Pajak	0,159		0,490	
Sosialisasi Pajak	0,370		0,417	0,291

Konsistensi internal instrumen pengukuran diuji menggunakan uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi, dan presisi instrumen pengukuran. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji reliabilitas dari kedua metode tersebut:

Tabel Uji Reliabilitas

	Alfa Cronbach	Keandalan Komposit	Hasil tes
Kepatuhan Wajib Pajak	0,873	0,901	
Tanda Terima Pajak	0,889	0,913	Dapat diandalkan
Program Amnesti Pajak	0,889	0,913	

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi),
url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

Sosialisasi Pajak	0,887	0,911
-------------------	-------	-------

Dari tabel 4, terlihat bahwa penilaian alpha Cronbach untuk setiap variabel berada di atas 0,70 - 0,90. Jadi, penilaian pengujian reliabilitas komposit melalui nilai alpha Cronbach dapat diterima dan dianggap memuaskan hingga baik untuk setiap konstruk dalam model penelitian.

Uji Model Internal

Tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana pemrosesan data smartPLS 4.0 menghasilkan nilai R-Square:

Tabel R-Square

R Square	R Kuadrat yang Disesuaikan
Kepatuhan Wajib Pajak	0,120
Tanda Terima Pajak	0,302

Model tersebut signifikan (baik), dan variabel lain memengaruhi Y karena Kepatuhan Wajib Pajak . menjelaskan 30 , 2 % varians pada Y. 6,2%, efek Kepatuhan WP . terhadap Pendapatan Pajak dengan nilai r - kuadrat sebesar 0,120 menunjukkan bahwa variabel-variabel dengan variasi dapat menjelaskan variasi dalam Pendapatan Pajak . Model ini signifikan (baik) pada 30,3 %, dan 69,7 % dipengaruhi oleh variabel lain dan pengaruh Program Amnesti Pajak dan Sosialisasi Pajak . Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor . Dengan r-squared, para peneliti mengukur relevansi prediktif model (Q2) setelah menentukan nilai ukuran efek (f2) untuk menghitung daya prediksi model (Hair Jr , Hult , Ringle , & Sarstedt , 2016) yang menyatakan bahwa Q2 mengevaluasi estimasi parameter dan nilai intrinsik model. Para peneliti menghitung Q2 menggunakan prosedur PLS blindfolding, yang memperoleh hasil estimasi dari skor variabel. Selain itu, para peneliti memperoleh skor variabel dari skor redundansi yang divalidasi silang. Hasil validasi silang yang diekstrak menentukan prediksi konstruk endogen, yang juga menunjukkan tingkat kualitas model. Menurut (Hair Jr. dkk., 2016), $Q2 > 0$ pada variabel endogen reflektif menunjukkan relevansi prediktif model, sedangkan $Q2 < 0$ menunjukkan kurangnya daya prediksi model.

Tabel F persegi

Kepatuhan Wajib Pajak	Tanda Terima Pajak	Program Amnesti Pajak	Sosialisasi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak		0,015	
Tanda Terima Pajak			
Program Amnesti Pajak	0.000	0,189	
Sosialisasi Pajak	0,128	0,079	

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa model tersebut memiliki relevansi prediktif sebesar 0,015 untuk Kepatuhan Wajib Pajak , 0,189 untuk Program Penyelesaian Pajak , dan 0,079 untuk Sosialisasi Pajak . Berdasarkan hasil ini, nilai F kuadrat dari kedua konstruk endogen jauh di atas nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model tersebut memiliki relevansi prediktif yang baik .

Untuk memvalidasi model, metode goodness of fit (GoF) disajikan oleh (Tenenhaus , 2004). Indeks GoF ini memvalidasi kinerja model pengukuran dan struktural secara simultan. Mengalikan R2 model dengan indeks komunalitas rata-rata menghasilkan nilai GoF . Hasil perhitungan goodness of fit model:

Tabel 7. Indeks Komunalitas Rata-Rata

	AVE	rho_A
Kepatuhan Wajib Pajak	0,873	0,876
Tanda Terima Pajak	0,889	0,892

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

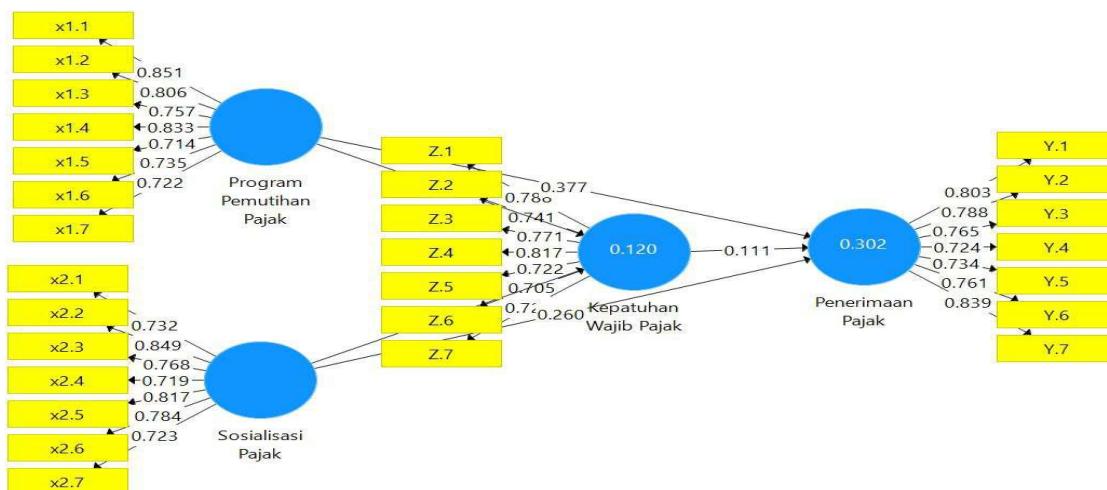
Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

Program Amnesti Pajak	0,889	0,903
Sosialisasi Pajak	0,887	0,895
Rata-rata	0,885	0,892
Kesesuaian yang Baik (Goodness Of Fit/GoF)		0,888

Rata-rata hasil kesamaan adalah 0,885, menurut tabel di atas. Hasil tersebut merupakan hasil perkalian R2 dan diakarkan. Nilai GoF yang dihitung adalah 0,888 , lebih signifikan dari 0,36 , menunjukkan bahwa model tersebut sangat baik (memiliki kemampuan tinggi) untuk merepresentasikan data empiris.

Analisis Jalur Hasil

Pengujian ini akan menentukan koefisien jalur dari model struktural. Tujuannya adalah untuk memeriksa signifikansi semua hubungan atau menguji hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dipisahkan menjadi efek langsung dan tidak langsung. Program SmartPLS 4.0 digunakan untuk memproses data, dan gambar berikut menunjukkan hasil pengujian hipotesis untuk efek langsung dan tidak langsung:



Gambar Koefisien Jalur

Dari gambar di atas, terlihat bahwa semua statistik t memiliki nilai lebih besar dari 1,96. Dengan demikian, setiap hubungan memiliki hubungan yang signifikan. Tabel koefisien jalur di bawah ini menunjukkan hasil uji hipotesis efek langsung:

Tabel Efek Langsung

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Deviasi Standar (STDEV)	Statistik T (O/STDEV)	Nilai P
Kepatuhan Wajib Pajak -> Pendapatan Pajak	0,111	0,106	0,127	0,871	0,384
Program Amnesti Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,007	-0,008	0,133	0,055	0,956
Program Amnesti Pajak -> Pendapatan Pajak	0,376	0,387	0,092	4,076	0,000
Sosialisasi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,349	0,364	0,124	2,807	0,005
Sosialisasi Pajak -> Pendapatan Pajak	0,298	0,307	0,100	2,973	0,003

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akutansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

Uji hipotesis pertama mengenai pengaruh Program Amnesti Pajak dan Pendapatan Pajak memperoleh nilai probabilitas $0,000 < 0,05$, yang berarti bahwa Program amnesti pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, respons positif pemerintah terhadap program amnesti pajak dianggap sangat efektif dalam meringankan beban wajib pajak kendaraan bermotor. Program amnesti pajak yang dibuat oleh pemerintah akan meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor karena wajib pajak hanya membayar pokok pajak, bukan denda, sehingga hal ini akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki tunggakan untuk membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor mereka sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor (Budiarti & Fadhilah, 2022). Hal ini menyimpulkan bahwa program amnesti pajak memang berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pengujian hipotesis kedua mengenai pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap penerimaan pajak memperoleh nilai probabilitas (p-value) sebesar $0,003 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Dengan seringnya sosialisasi pajak, semakin banyak orang akan memahami pentingnya dan manfaat membayar pajak sehingga masyarakat akan termotivasi untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Kegiatan sosialisasi pajak yang dilakukan untuk memperluas potensi wajib pajak baru tentu dapat diandalkan karena jumlah penduduk semakin bertambah, semakin tinggi tingkat sosialisasi pajak yang diberikan oleh otoritas pajak kepada masyarakat, semakin besar pula penerimaan pajak yang akan diperoleh (Sari dkk., 2020). Sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak akan memengaruhi penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakat mengetahui dan memahami kebijakan terkait. (Wahyudi & Arditio, 2018). yang menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pengujian hipotesis ketiga tentang pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, memperoleh nilai probabilitas (p-value) sebesar $0,005 < 0,05$, yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sering sosialisasi pajak dilakukan terkait informasi terbaru, manfaat, dan prosedur pembayaran pajak, semakin banyak wajib pajak yang akan menerima informasi dan memahami pajak kendaraan bermotor, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penyediaan sosialisasi oleh pemerintah membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan pemahaman tentang perpajakan, yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar untuk bertindak dan membuat keputusan mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak (Ardiyanti & Supadmi, 2020). yang menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak yang dilakukan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Program Amnesti Pajak berdampak pada Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor . Sosialisasi pajak berdampak pada Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor . Program Amnesti Pajak tidak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak . Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pendapatan pajak kendaraan bermotor . Program Amnesti Pajak tidak berpengaruh pada Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Kepatuhan Wajib Pajak . Kendaraan Bermotor melalui Kepatuhan Wajib Pajak di UPT. SAMSAT Sumatera Utara . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu: Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak , hanya

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),
url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

program amnesti pajak , sosialisasi pajak , dan kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak . Peneliti memiliki keterbatasan dalam mendistribusikan kuesioner. Jumlah kuesioner yang dapat didistribusikan hanya 100 kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pimpinan UPT. SAMSAT Sumatera Utara aktif memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak (surat kabar , papan reklame), media elektronik (television, radio) dan media sosial (Facebook, Instagram dan lain-lain) , sehingga banyak orang memahami dan penerimaan pajak akan meningkat.

REFERENSI

Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) - Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis* . CV ANDI OFFSET.

Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* , 16 (1), 657–672.

Dahrani, D., Sari, M., Saragih, F., & Jufrizan, J. (2021). Model Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak yang Melakukan Usaha di Kota Sumatera). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* , 21 (02), 379–389.

Dzulfitriah, F., & Saepuloh, C. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut. *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi* , 4 , 32–39.

Hartanti, Ratiyah, Setyaningsih Dyah, E., & Ammelia Rizky, D. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Badung Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* , 9 (1), 23–28.

Ilhamsyah, R., Endang, MGW, & Dewantara, RY (2016). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* , 8 (1), 1–9.

Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi* . Pers UMSU.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Ritonga, P. (2012). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumatera Timur. *Jurnal SAINTIKOM* , 11 (3).

Rudianti, W., & Endarista, VD (2021). Tarif, Kesadaran Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Media Komunikasi Dan Bisnis* , 12 (1), 69–90.

Saragih, F., & S, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Sumatera Kota). *Jurnal Manajemen Perpajakan* , 6 (1), 1–10.

Sari, HAY, Makaryanawati, & Edwy, FM (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Riset Dan Jurnal Akuntansi* , 4 (2), 603–615.

Sasana, LPW, Indrawan, IGA, & Hermawan, R. (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi* , 5 (2), 127–134.

Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0 Untuk*

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol. 7 No 1 2026 hal. 32-42

Hubungan Nonlinier Dalam Penelitian Sosial Dan Bisnis . ANDI OFFSET.

Siahaan, MP (2010). *Pajak Dera dan Retribusi Daerah* . PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D* . Alfabet.

Ulya, H., Harmain, H., & Harahap, RD (2022). Efektivitas Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak dalam Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Pada Kantor Bersama SAMSAT Natal). *J-ISACC: Jurnal Kompetensi Akuntansi Islam* , 2 (1), 73–87.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumatera Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* , 18 (2), 100–111.

Widajantie, TD, & Saiful, A. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama SAMSAT Surabaya Selatan). *BAJ (Jurnal Akuntansi Perilaku)* , 3 (2), 129–143.

Yulitiawati, & Meliya, PO (2021). Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Jurnal Ekonomika* , 14 (2), 195–206.